

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADANASABAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH
TEMPO**

**(Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar
Lampung)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

Hendri Syatriawan

NPM :1351020113

Jurusan: Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H/ 2017 M**

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA
NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO
(Studi Kasus Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

Hendri Syatriawan

NPM : 1351020113

Jurusan: Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Dr. Hj Heni Noviarita, S.E., M.E
Pembimbing II : Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

Perbankan syariah sebagaimana halnya dengan perbankan konvensional di Indonesia adalah lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. kegiatan penyaluran pembiayaan disisi lain mengandung risiko yaitu tidak kembalinya dana/pembiayaan yang disalurkan tersebut salah satunya terjadi karena nasabah pembiayaannya meninggal dunia dengan masih mempunyai kewajiban angsuran. Dalam hal ini penulis tertarik meneliti penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo studi pada BPRS Bandar Lampung”.

Berdasarkan dari kenyataan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana cara penyelesaian pembiayaan yang nasabahnya meninggal dunia sebelum jatuh tempo (masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran) pada BPRS Bandar Lampung dan bagaimana penyelesaian yang dilakukan BPRS Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam?. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Untuk memecahkan masalah yang ada penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode interview, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti merangkum hasil penelitian dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting atau mencari tema dari penelitian, kemudian peneliti menyajikan hasil penelitiannya dalam bentuk uraian singkat yang mudah untuk dipahami.

Hasil Penelitian. Penyelesaian yang dilakukan untuk kasus anggota yang meninggal dunia yaitu dengan membebaskan anggota yang masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran dengan mengajukan klaim asuransi pada lembaga asuransi. Dan Bank BPRS Bandar Lampung ini dalam menyelesaikan masalah yang nasabahnya meninggal dunia ini sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam karena dari prosesnya Bank BPRS Bandar Lampung menerapkan prinsip keadilan yang mana tidak ada pihak yang dirugikan semuanya sudah sesuai dengan asas-asas Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Tlp. (0721) 703531 Fak. 780422

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (studi kasus pada BPRS Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : Hendri Syatriawan

NPM : 1351020113

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si.
NIP.196511201992032002

Bandar Lampung, 28 September 2017

Pembimbing II

Budinansyah, M., Kom. I
NIP.197707252002121003

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP.197905142003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721)) 703531 Fak. 780422

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Penangan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo”** (Studi Kasus Pada PT. BPRS Bandar Lampung) disusun oleh: **Hendri Syatriawan, NPM: 1351020113, Jurusan Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: Kamis, 20 Desember 2017.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Supaijo, S.H., M.H.

()

Sekretaris : Okta Suprianingsih, M.E.Sy.

()

Penguji I : Dr. Asriani, S.H., M.H.

()

Penguji II : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si.

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Moh Bahrudin, M.A
NIP. 195808241989031003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

(QS. Al-Maidah :2)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah atas rencananya yang begitu indah untuk penulis. Penulis yakin semua akan tercapai jika berusaha dan selalu percaya kepada-Nya. Tak lupa shalawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW, semoga Syafa'at Beliau selalu menyertai penulis Dunia dan Akhirat. Amin.

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Syamsul Rahman dan Ibu Hertati dan kakak-kakakku, penulis menghaturkan terima kasih banyak atas seluruh kasih sayang, perhatian, do'a dan dukungannya kepada penulis.
2. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu agar kedepannya mampu berfikir lebih maju.
3. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
4. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2013 khususnya PS B.
5. Sahabat-sahabat terbaikku (Ahmad Syahbudin, Asep Saepudin, Wahyu Nadzar, Panca Agustiawan, Ade Andika Saputra, M. Irfan Dzqy, M. Khanif Amrullah, Hamdi Kurniawan, Ramadhan, Feby Suci Yulanda, Intan Marlia) yang selalu memotivasi dan memberikan semangat kepadaku sampai menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Batu Ranau, Kabupaten OKU Selatan, Sumatra Selatan, pada Tanggal 31 Januari 1996, sebagai anak ke lima dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Syamsul Rahman dan Ibu Hertati. Penulis memiliki 4 orang kakak laki-laki yang bernama Adi Candra, Cindiko Alikhan, Pobi Nuryandi, Dan Dolis Juliansyah.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah :

1. Pada tahun 2001 penulis menginjak pendidikan pertama di SD Negeri 3 Kota Batu, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan, dan selesai pada tahun 2007
2. Pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di MTS Negeri Kota Batu, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan, dan selesai pada tahun 2010.
3. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan kejenjang pendidikan SMA di SMAN 1 WARAS, OKU Selatan, dan selesai pada tahun 2013
4. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dengan mengambil program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang dilaksanakan di BPRS Bandar Lampung.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mampu membimbing manusia dari jalan sesat menuju jalan yang diridhai Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian pula kepada para keluarga, sahabat dan para penerus perjuangan beliau hingga hari ini.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat kelulusan Program studi Strata satu (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Tugas Akhir ini dapat tersusun atas bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Moh Baharudin, M.A. selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis islam yang senantiasa mengayomi mahasiswa.
2. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E. selaku ketua Program Prodi Perbankan Syariah yang senantiasa memotivasi dan memberikan dukungan kepadapenulis.
3. Ibu Dr. Heni Noviarita, S.E., M.S.I selaku pembimbing I dan Bapak Budimansyah, M. Kom. I selaku pembimbing II yang dengan sabar

memberikan bimbingan dan arahnya dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingannya dan motivasinya selama ini, serta saran-saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis.
5. Bapak Ridwansyah selaku Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta segenap pegawai yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki, untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan karya tulis ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 19 - September - 2017

Penulis

Hendri Syatriawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
F. Studi Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	12
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pembiayaan	19
B. Pembiayaan Murabahah.....	40
C. Dasar Hukum Murabahah	45
D. Rukun Dan Syarat Murabahah.....	47
E. Karakteristik Murabahah	48

F. Manfaat Pembiayaan Murabahah	50
G. Identifikasi Resiko Pembiayaan Berdasarkan Akad Murabahah.....	51

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Sejarah Bprs Bandar Lampung	52
B. Identitas Perusahaan	56
C. Visi Dan Misi Bprs Bandar Lampung	56
D. Susunan Pengurus	57
E. Perizinan	58
F. Kegiatan Usaha	58
G. Perkembangan Usaha.....	58
H. Struktur Organisasi Bprs Bandar Lampung.....	59
I. Produk-Produk BPRS Bandar Lampung	62

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Umum Pengajuan Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bandar Lampung.....	66
B. Penanganan Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo Di BPRS Bandar Lampung	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN.....	82

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Nasabah meninggal dunia sejak tahun 2015-2017

TABEL 1.2 Perkembangan Usaha



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Pembiayaan Murabahah

Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung

Gambar 1.3 Proses Klaim Asuransi



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing
- LAMPIRAN 2 : Kartu Konsultasi Skripsi
- LAMPIRAN 3 : Surat Izin Pra riset Dan Riset
- LAMPIRAN 4 : Daftar Pertanyaan
- LAMPIRAN 5 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul skripsi ini perlu penulis jelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini. **“PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO”**

A. Penegasan Judul

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam penelitian ini, yaitu “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bandar Lampung)” Dengan adanya penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesalah pahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

Analisis adalah penguraian salah satu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Harga barang dalam perjanjian *murabahah* dibayar nasabah (pembeli) secara cicilan.³ prinsip keuangan islam didasarkan pada aturan bahwa keuntungan yang diperoleh dari suatu barang merupakan imbalan atas tanggung jawab penjual terhadap kemungkinan hilangnya barang itu selama dalam penguasaannya dan belum beralih kepemilikannya kepada pembeli.⁴

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara objektif

Mengingat masalah analisis penanganan pembiayaan pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo ini sesuatu hal yang belum dibicarakan oleh masyarakat luas, oleh karena itu akan dilakukan

¹ Nurul Oktim, *Kamus Ekonomi*, Cetakan Pertama PT. Aksana Sinergi Medi, Surakarta 2012, hlm.12

² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, h.681

³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 95.

⁴ Sutan remy Sjhdeini, *Perbankan Syariah dan Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 192.

penelitian judul skripsi ini dan judul ini menarik untuk dibahas sebagai penambah wawasan.

2. Secara subjektif

- a. Judul tersebut menarik untuk diteliti, terlebih judul tersebut berkaitan dengan jurusan penulis yaitu perbankan syariah.
- b. Ketersedian data atau informasi yang penulis butuhkan terkait judul yang akan diteliti, baik data skunder maupun data primer memiliki kemudian akses dan letak objek penelitian mudah dijangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pinjaman.⁵

Disamping itu peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya suatu perekonomian negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara

⁵ Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 33.

dapat juga dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin di butuhkan pemerintah dan masyarakat.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “*nyawa*” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang sangat vital.⁶

Sama halnya dengan Perbankan Syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak *surplus fund* dengan pihak *defisit fund* dituntut untuk mengalirkan Dana Pihak Ketiga (DPK) ke sektor riil. Namun, fungsi tersebut belum sepenuhnya di praktekkan oleh bank-bank, khususnya bank syariah. Mereka lebih dominan memberikan pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*), yang memberikan retun dengan tingkat resiko yang lebih kecil, daripada pembiayaan modal kerja (*mudharabah*) dengan sistem bagi hasil.

perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang islami. Perkembangan dunia terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurun waktu hanya 7 tahun mampu memiliki lebih dari 45 outlet yang terbesar di Jakarta, Bandung, Balikpapan,

⁶ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 3.

Semarang dan Makassar. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya. Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah (Pasal 1 ayat 8-9) yang terbit pada tanggal 16 juli 2008 berdasarkan jenisnya, bank syariah dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan perbedaan dari keduanya adalah ada atau tidaknya pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam kegiatan operasionalnya (misalnya: transfer dan kliring), dimana pada Bank Umum Syariah terdapat layanan jasa tersebut sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak.⁷

Lembaga keuangan baik dengan sistem syari'ah maupun konvensional, yang telah ada belum mampu dijangkau oleh pengusaha mikro karena persyaratan dan prosedur yang ditawarkan dinilai terlalu rumit. Jika hal ini terus dibiarkan, konglomerasi ekonomi akan berkembang tanpa batas, kesenjangan sosial akan semakin menganga dan malapetaka nasional akan semakin tak terhindari.⁸

Bagi Bank Syari'ah, keadaan mismatch dalam kondisi normal dapat pula terjadi, mengingat resiko usaha yang selalu ada, baik resiko likuiditas maupun resiko kredit.⁹ Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan

⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakrta: PT Grame Pustaka Utama, 2012, h. 15

⁸ Baihaqi Abdul Majid dan Syaifudin A. Rasyid, *Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah* (Jakarta: Pinbuk, 2000), h. 188.

⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktek ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 178.

syariah yang dalam ruang lingkup mikro yaitu BPRS hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu perekonomian rakyat menengah kebawah.

Dalam pembiayaan yang di salurkan BPRS terdapat berbagai macam resiko yang mungkin dihadapi salah satunya yaitu resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang terjadi akibat kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya yaitu berupa pembayaran angsuran baik pokok dari pembiayaan maupun *margin*/bagi hasil pembiayaan. Resiko yang menyebabkan pengembalian pembiayaan terhambat bahkan menjadi macet salah satunya adalah adanya musibah. Selain itu resiko kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap sehingga tidak bisa berusaha juga menjadi kendala dalam pelunasan pembiayaan apalagi ketika anggota pembiayaan tersebut meninggal dunia tentunya akan menjadi beban bagi ahli waris (keluarga) yang ditinggalkan untuk melunasi pembiayaan. Hal ini akan berakibat pembiayaan macet apabila ahli waris tidak mampu atau tidak mau melunasi pembiayaan tersebut.

Dalam salah satu kasus yang terjadi di BPRS Bandar Lampung terdapat nasabah pembiayaan yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo, nasabah tersebut masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran Sebesar Rp.18.900.000. Kemudian keluarga nasabah mendatangi kantor bank untuk meminta keringanan. Disisi lain bank di dalam operasionalnya tentunya ia memiliki tanggungjawab terhadap dana dari anggota penyimpan yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

**TABEL I.I NASABAH MENINGGAL DUNIA SEJAK TAHUN
2015-2017**

TAHUN	NAMA NASABAH	TANGGAL MENINGGAL	SISA ANGSURAN
2015	Yohanes Hartono	13-Jun-15	9,750.000
2015	Meyrizal Makki	6-Dec-15	12,488.880
2016	Muslik	10-Jan-16	138.948.210
2016	Jon Haidir	31-Jan-16	9,432.502
2016	Denny Hardiansyah S	16-Jun-16	2,716.665
2016	Yantoni, S.Sos	28-Sep-16	2,731.938
2017	Zalyufid Hiba	11-Feb-17	31,554.630
2017	Haryoko Syaefuddin	12-Feb-17	18,900.000
2017	Yulisna Yusuf	4-Mar-17	35.000.000
2017	Zetyra Zen	15-May-17	39,711.204
2017	Septiana Sulaiman	22-Jun-17	30,740.002

Sumber Data : BPRS Bandar Lampung

Dalam pemberian pembiayaan, BPRS Bandar Lampung menggunakan akad *Murabahah*, *Murabahah* itu sendiri adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah* bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau keuntungan. Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank di rundingkan dan ditentukan di muka antara bank dan nasabah.¹⁰ Akad

¹⁰ Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, Cet III, h. 64

murabahah sendiri adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari di BPRS ini, karena karakternya yang *profitable* dan mudah dalam penerapan.

BPRS Bandar Lampung didirikan dengan maksud agar dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat, memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup.

BPRS Bandar Lampung merupakan lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakan dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat harus sesuai prinsip-prinsip syari'ah.

Peranan umum BPRS Bandar Lampung adalah melakukan pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syari'ah islam. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka terdapat produk-produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan dengan menggunakan akad yang sesuai syari'at islam, seperti akad *murabahah* dan. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pendanaan dapat memilih pembiayaan yang akadnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan tujuannya.

BPRS Bandar Lampung sebelum memberikan pembiayaan, sering kali memerlukan informasi yang akurat mengenai calon debitur serta

kepastian hukum yang disertai keyakinan dimana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya. Pihak BPRS juga senantiasa dituntut untuk konsisten dalam menyalurkan pembiayaan dan disiplin dalam menerapkan prosedur yang telah ada.

Dalam pertumbuhan aset BPRS Bandar Lampung sejak tahun 2013 pertumbuhannya sangat signifikan, ditahun 2013 aset BPRS sebesar 28,8 Milyar sampai tahun 2016 sebesar 61 Milyar.¹¹

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji pembiayaan murabahah yang merupakan penyaluran dana yang dilaksanakan di BPRS Bandar Lampung. Oleh karena itu penulis membahas dalam bentuk penelitian dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo” yang mana penelitian ini akan dilakukan di BPRS Bandar Lampung.

¹¹ <http://banksyariahlampung.com> Di akses pada tanggal 18 april 2017 pukul 16:56

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana BPRS Bandar Lampung dalam menangani pembiayaan *murabahah* yang nasabahnya meninggal dunia sebelum jatuh tempo (masih terdapat kewajiban angsuran) ?
2. Bagaimana penanganan BPRS Bandar Lampung pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dalam pandangan Prinsip Ekonomi Islam ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis diatas, maka ada beberapa tujuan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Tujuan dari pelaksanaannya penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bagi anggota yang meninggal dunia di BPRS Bandar Lampung.
 - b. Untuk mengetahui penanganan BPRS Bandar Lampung pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dalam pandangan Prinsip Ekonomi Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan.
 - b. sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi bank agar bisa meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam memilih nasabah.

- c. Dapat memberikan solusi terbaik dalam memecahkan masalah penanganan pembiayaan bagi anggota yang meninggal dunia.
- d. Dapat mengantisipasi kejadian yang akan merugikan kedua belah pihak, yaitu bank dan anggota/nasabah.

F. Studi Pustaka

1. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Zainudin yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BMT Surya Sekawan Mandiri)” hasil penelitian ini adalah penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT Surya Sekawan Mandiri dari beberapa tahapan, yaitu. dengan melakukan pendekatan dan kunjungan langsung ke rumah nasabah, apabila nasabah tidak mampu melunasi piutang BMT maka diberikan kelonggaran dan keringanan yang diberikan BMT kepada nasabah sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Langkah-langkah lain seperti tambahan dana, eksekusi jaminan, dan penghapusan piutang juga dilakukan dengan cara kekeluargaan dan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.¹²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nirwan Fauzy yang berjudul “analisis penanganan pembiayaan *mudharabah* pada anggota yang meninggal dunia di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang”. Hasil penelitian ini adalah penanganan yang dilakukan oleh BMT Mitra

¹² Muhammad Zainudin. *analisis penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dalam perspektif ekonomi islam (Studi Pada BMT Surya Sekawan Mandiri)*. (Skripsi Strata Satu Program Studi (Ekonomi Islam) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015)

Hasanah untuk kasus anggota yang meninggal dunia, namun masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran adalah membebaskan angsuran pembiayaan yang kurang dengan mengajukan klaim kepada penghimpun BMT Indonesia (PBMT). Untuk membuktikan kebenaran anggota meninggal disertakan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang di perlukan maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan cara menggunakan mengenai suatu kenyataan empiris dari objek yang dijadikan penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang dapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Sedangkan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. *Library Research* (pengumpulan data melalui kepustakaan), Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup

¹³ Muhammad Nirwan Fauzy. *analisis penanganan pembiayaan mudharabah pada anggota yang meninggal dunia* di (BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang). (program diploma III perbankan syariah) fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN walisongo semarang, 2016

kepastakaan. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literature yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

- b. *Field Research* (penelitian lapangan) penelitian dalam kanca kehidupan yang sebenarnya.¹⁴ Dengan datang langsung, mengunjungi, mempelajari dan melakukan wawancara pada BPRS Bandar Lampung

2. Sumber Data

Data yang di pergunakan dalam penelitan ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli.¹⁵ Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personil yang di teliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data primer yang di proleh dalam penelitian ini berasal dari hail wawancara langung kepada pihak yang berkompetan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Kalianda dan dari beberapa petani yang ada di daerah Kalianda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dilaporkan dan dikumpulkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri,

¹⁴ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM. 2002), h. 142.

¹⁵ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 102

walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.

Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instransi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak besar.¹⁷ observasi ini akan dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode *Interview*

¹⁶ Moh Papundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 57-58

¹⁷ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA BANDUNG, 2014), h.145.

yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.¹⁸

Jenis wawancara yang akan di lakukan peneliti adalah jenis wawancara tidak terstruktur yang artinya wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara akan dilakukan dengan bagian pembiayaan BPRS Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life history*), ceritra, bografi peraturan, kebijakan. Dokumnetasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, seketsa dan lain-lain. Dokumentasi berbentuk karya misalnya karya seni yang berbntuk gambar, patung, film dan lain-lain.¹⁹

¹⁸ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), h. 83.

¹⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: ALFABETA. 2010), h. 410-422.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah *generalisasi* yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh obyek yang akan menjadi fokus penelitian populasi. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pembiayaan BPRS Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karna keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.²⁰ Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian pembiayaan.

5. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. dalam mengolah data kualitatif

²⁰ *Ibid.* h. 115-116.

dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

a. *Reduksi*

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

b. *Penyajian Data*

Setelah dilakukan direduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data, data disajikan dalam bentuk tabel, grafik.

c. *Penarikan Kesimpulan*

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.²¹

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat

²¹ Sugiyono. *Op.Cit.* h. 431-438

diinformasikan kepada orang lain. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.

Analisis data menggunakan metode berfikir *deduktif*, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum atau teori-teori menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan penalaran atau rasio-rasio.²² Dengan metode ini, penulis mengambil kesimpulan dari pernyataan yang umum, seperti teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah. Kemudian menuju pernyataan khusus, yaitu memaparkan keadaan di lapangan, yang dimana penulis memaparkan mengenai penanganan bank dalam menyelesaikan permasalahan apabila nasabahnya meninggal dunia.

²² Nana sudjana, *tuntunan penyusunan karya ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 6.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban

mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.²⁴

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (*Deficit Unit*). Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal sebagai berikut :

- a. *Pembiayaan Produktif* : Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha.
- b. *Pembiayaan konsumtif* : pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²⁵

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum berdasarkan akadnya ada 3 jenis transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah, yaitu:²⁶

- a. Prinsip Bagi-Hasil

(*Profit Sharing*) Prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah dan juga BMT dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

²⁴Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2009, hlm.85.

²⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: UUP-AMP YKPN, 2002) h. 160

²⁶Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Prees, 2001), hlm. 161.

1) *Al-Musyarakah*

adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ expertise) dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan proyek *Al-musyarakah* biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.²⁷

2) *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila modal kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

²⁷ *Ibid*, h.93

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana *Al-Mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka, tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.²⁸

3) *Al-Muzaro'ah*

Al-Muzaro'ah adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Dalam konteks ini lembaga keuangan islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.²⁹

4) *Al-Musaqoh*

Al-Musaqoh adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, sipenggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.³⁰

²⁸ *Ibid*, hlm. 97

²⁹ *Ibid*, hlm. 99

³⁰ *Ibid*, h. 100

b. Prinsip Jual Beli (sale and purchase)

Prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah adalah

1) *Bai Al-Murabahah*

adalah persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli. Akad dalam transaksi ini menggunakan bentuk *natural certain contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of Profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).³¹

Pada dasarnya, pendirian bank syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan.

Dalam Al-qur'an, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba yaitu terdapat dalam QS.Ar-Rum: 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat

³¹Adiwarman.A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010).Cet-7, h. 97.

demikian) *Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*”.³²

Selanjutnya, dalam QS. Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
١٣٠

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”.

2) Bai As-salam

adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh

3) Bai Al-Istishna

adalah jual beli barang yang dilakukan dimana penjual membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri.

c. Prinsip sewa (*Operational lease and financial lease*)

Prinsip sewa yang ditetapkan pada bank-bank syariah adalah *alijarah*. *Al-ijarah* merupakan perjanjian antara pemilik barang dan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah masa akad berakhir, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. *Al-ijarah muntahiya bittamlik*

³²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya, Danakarya, 2004), h.

merupakan kombinasi jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dan nasabah yang diberikan hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad.³³

d. Prinsip Jasa (*fee-based services*)

1) *Al-Wakalah*

adalah jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank merupakan kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalannya. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

2) *Al-Kafalah*

adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh pihak bank sebagai penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, makfuul anhu atau ashil).

2) *Ar-Rahn*

adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis.

3. Unsur-unsur Pembiayaan

³³Syafi'i Antonio, *Opcit*, h. 126.

Unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut.³⁴

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan adalah antara pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangkan hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka Waktu

pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan yang diberikan padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena

³⁴ Ainah Rahmawati, *Analisis Penyaluran Pembiayaan bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kota Baru Januari 2013-Desember 2013*, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2015), h. 37-38

nasabah tidak sengaja. Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

e. Balas Jasa

Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil atau margin.

4. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:³⁵

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

³⁵ Muhammad, *Opcit*, h. 17-19

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu

meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni:

1. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanam pada bank tersebut.

2. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat

a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b. Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

c. Masyarakat umumnya atau konsumen Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dialayaninya.

5. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, menurut Sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:³⁶

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas..

b. Meningkatkan daya guna barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bhan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

³⁶*Ibid.* hl m. 19-21

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

1) Pengendalian inflasi

- 2) Peningkatan ekspor
 - 3) Rehabilitasi prasarana
 - 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan berlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Di samping itu dengan makin efektifnya kegiatan sewa semada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti kan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor- sektor lain yang lebih berguna.

6. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah

pada saat melakukan pembiayaan. Secara umum, prinsip pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:³⁷

a. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran ”kemauan” membayar.

b. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuan” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan lainnya.

³⁷*Ibid.* h. 60

Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Selain menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis pembiayaan juga terdapat 7P yaitu:³⁸

a. Personally

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personally juga mencakup sikap,

³⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 10, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 95-97

emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan *Character* dari 5C.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula di bank. Pembiayaan untuk pengusaha lemah, sangat berbeda dengan pembiayaan untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, margin dan persyaratan lainnya.

c. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif, atau untuk tujuan perdagangan.

d. Prospect

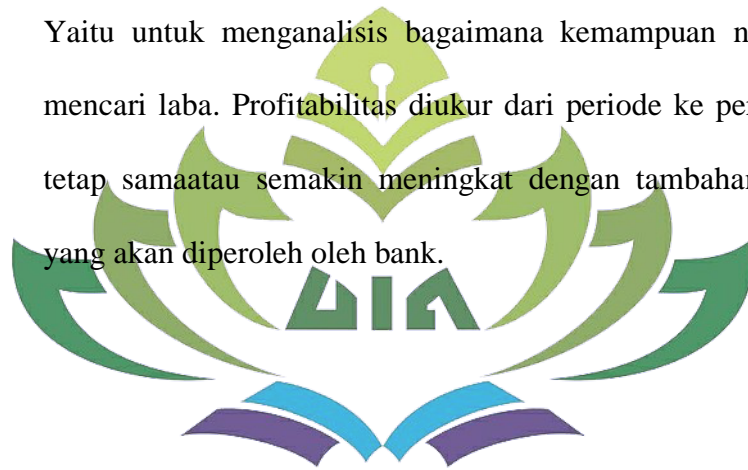
Yaitu untuk menilai usaha bank dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang di biyai tanpa menggunakan prospek, bukan banyak bank yang rugi tetapi juga nasabah.

e. Payment

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana atau untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sector lainnya.

f. Profitability

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode ke periode. Apakah tetap sama atau semakin meningkat dengan tambahan pembiayaan yang akan diperoleh oleh bank.



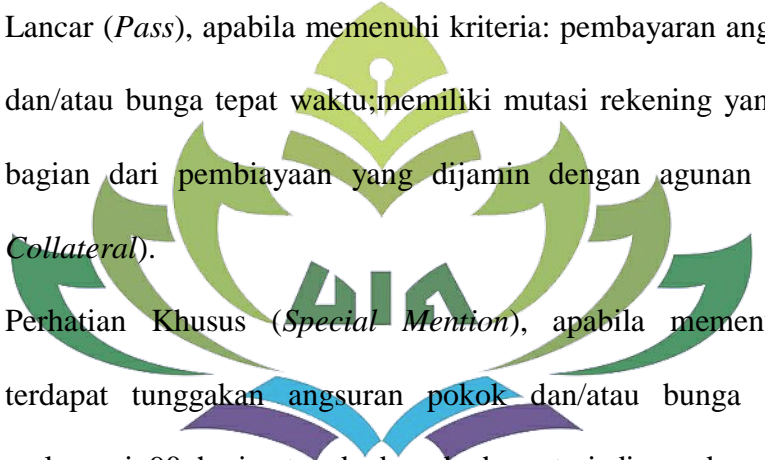
g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan .perlindungan dapat berupa jaminan barang.

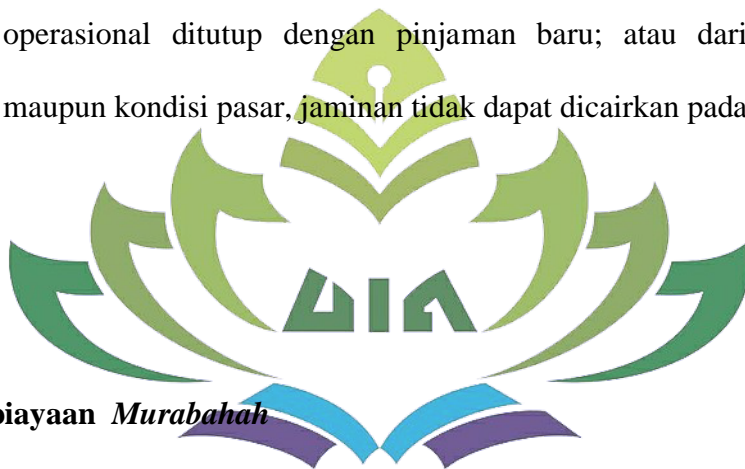
7. Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan bank didasarkan pada kolektibilitas atau ketepatan pembayaran kembali angsuran pokok dan bagi hasil atau margin serta kemampuan peminjam dari keadaan usahanya. Kolektibilitas yang

dimaksud didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar margin atau bagi hasil, angsuran serta melunasi pinjamannya kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran margin, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman menurut SK DIR. BI No. 30/267/Kep/DIR/1998 dengan rincian sebagai berikut:

- 
- a. Lancar (*Pass*), apabila memenuhi kriteria: pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; memiliki mutasi rekening yang aktif; atau bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*Cash Collateral*).
 - b. Perhatian Khusus (*Special Mention*), apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau kadang-kadang terjadi cerukan; atau mutasi rekening masih relatif aktif; atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau didukung oleh pinjaman baru.
 - c. Kurang Lancar (*Substandard*), apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau sering terjadi cerukan; atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumentasi pinjaman yang lemah

- d. Diragukan (*Doubtfull*), apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran dan/atau bunga yang telah malampui 180 hari; atau terdapat cerukan yang bersifat permanen; atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau terjadi kapitalisasi bunga; atau dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet (*Loss*), apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan pokok dan/atau margin yang telah melampui 270 hari; atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.³⁹



B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhun* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah

³⁹ Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Syar'I System*, ed. 1 (Jakarta : Raja Grafindo. 2007) h. 474

disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁴⁰ Sedangkan pengertian *Murabahah* menurut Pernyataan Standar Akutansi Syariah (PSAK) No. 102 paragraf 5 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).

Sedangkan pengertian *murabahah* menurut beberapa praktisi perbankan di definisikan sebagai berikut :

- a. Muhammad Syafe'i Antonio menjelaskan bahwa bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan

⁴⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. h. 161

yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

- b. Warkum Sumitro membedakan pengertian keduanya, dimana pengertian murabahah adalah persetujuan jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut meliputi cara pembayaran sekaligus.⁴¹
- c. Menurut Adiwarman Karim, bahwa cara pembayaran murabahah dapat dilaksanakan baik dalam bentuk *lump sum* (sekaligus maupun dalam bentuk angsuran).⁴²
- d. Dan menurut Sutan Remy Sjahdeini, murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.⁴³

UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "akad *murabahah* adalah akad pembayaran suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati". Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang

⁴¹ Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait : BMI dan Tafakul di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 37

⁴² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 161

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1999), h 64

biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran *margin* keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.⁴⁴

Jadi, pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana pihak bank membeli barang terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kepada *supplier* atau pemasok kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga perolehan di tambah dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad *murabahah* di bank syariah diterapkan dalam bentuk pembiayaan:

1. Pembiayaan konsumtif Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Misalnya: pembiayaan kendaraan, pembiayaan pembelian alat-alat rumah tangga.⁴⁵
2. Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan

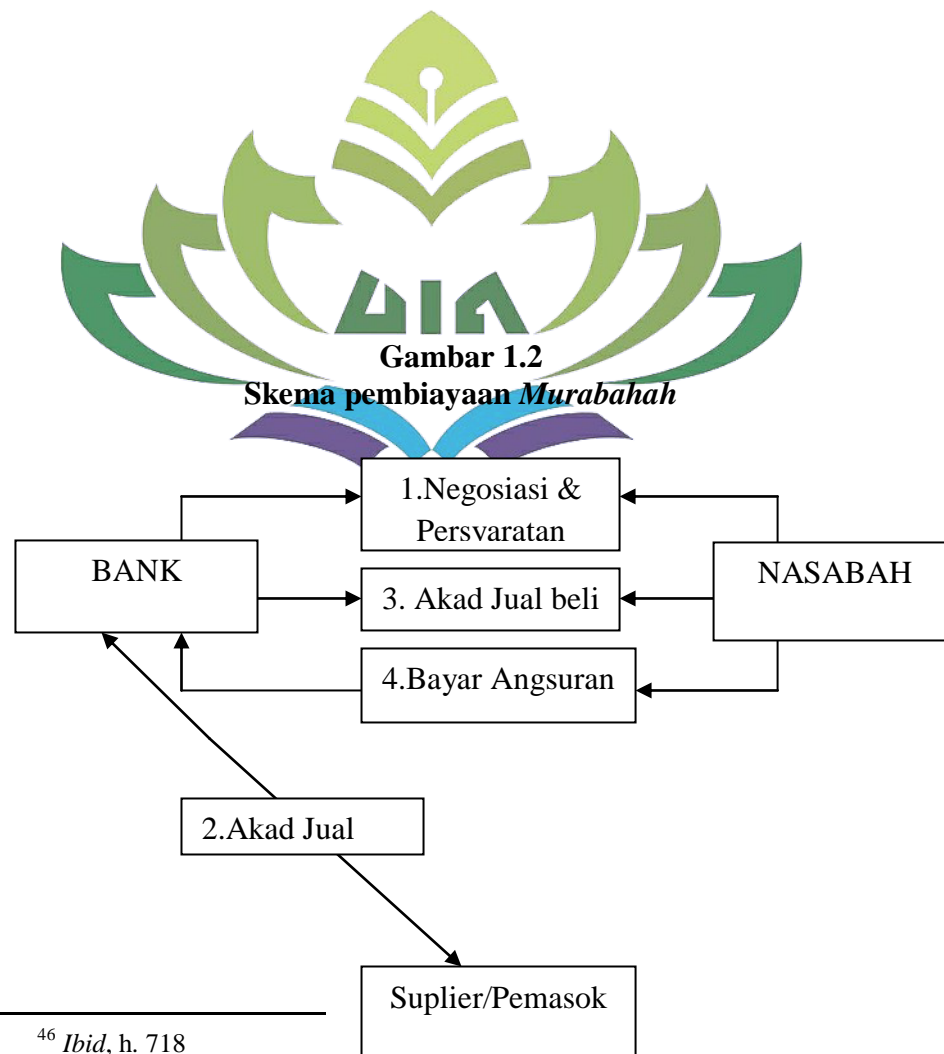
⁴⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang : Akademia Permata, 2012, h. 141-142

⁴⁵ Veitzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, h. 750

aktiva lancar perusahaan. Misalnya: pembelian bahan baku, barang dagangan.⁴⁶

3. Pembiayaan Investasi pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. Misalnya: untuk pembelian mesin-mesin, bangunan.⁴⁷

Berikut Skema Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah:



⁴⁶ Ibid, h. 718

⁴⁷ Ibid, h.720

a) Negoisasi

Pada tahap ini, nasabah melakukan negoisasi dengan pihak bank mengenai barang yang diinginkan nasabah. Disisi bank akan mengajukan persyaratan–persyaratan kepada nasabah.

b) Pembelian barang antara bank dengan *supplier*

Berdasarkan kesepakatan awal yang telah disetujui bersama, bank kemudian membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dari pihak pemilik barang atau *supplier*. Bank seketika itu juga melakukan pembayaran kepada pemilik barang.

c) Akad jual beli antara bank dan nasabah

Setelah barang dikuasai oleh bank, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah secara *murabahah*. Setelah segala akad ditandatangani oleh kedua belah pihak, bank kemudian menyerahkan barang kepada nasabah.

d) Bayar angsuran

Nasabah kemudian membayar angsuran sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

C. Dasar Hukum Murabahah

1. Al-Qur'an

QS. An-nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

QS. Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

2. Al-Hadits

“Dari Shuaib Al-Rumi ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, muqaradah (Murabahah) dan bercampur tepung dengan 25 gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah)

3. Kaidah fiqh tentang murabahah.

Artinya : *hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa hukum melaksanakan muamalah yang didalamnya meliputi

transaksi *murabahah* adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan tentang transaksi tersebut.⁴⁸

4. Undang-Undang

- a) Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 No. 1 Huruf D yang berbunyi “Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*.”

D. Rukun dan Syarat Murabahah

1. Pihak yang berakad
 - a) Cakap hukum
 - b) Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa bahkan dibawah tekanan.
2. Objek yang diperjual belikan
 - a) Tidak termasuk yang diharamkan
 - b) Bermanfaat
 - c) Penyerahan dari penjual ke pembelian dapat dilakukan
 - d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - e) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembelian dan diserahkan penjual

⁴⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi*. h. 143-144

3. Akad atau sighat:

- a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
- b) Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
- c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang
- d) Tidak membatasi waktu misalnya saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.⁴⁹

E. Karakteristik *Murabahah*

1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli, sedangkan *murabahah* tanpa pesanan, penjual menyediakan barang dagangannya tidak terpengaruh atau terikat langsung dengan ada atau tidaknya pembeli.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya, Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami,

⁴⁹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta : PT Fajar Interpratama, 2013, h. 46.

penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

3. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

4. Akad *Murabahah* dikenalkan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

5. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:

- a) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
- b) Diskon biaya asuransi dalam rangka pembelian barang.
- c) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual atau aset lainnya.
9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati dan jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli :
 - a) Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu
 - b) Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:

- a) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu
- b) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.⁵⁰

F. Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

1. Bagi Bank

Manfaat pembiayaan *murabahah* bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin*.

2. Bagi Nasabah

Manfaat bagi nasabah sebagai penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa perjanjian.⁵¹

G. Identifikasi Resiko Pembiayaan Berdasarkan akad *Murabahah*

Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi UUS dan BUS. Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, resiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung

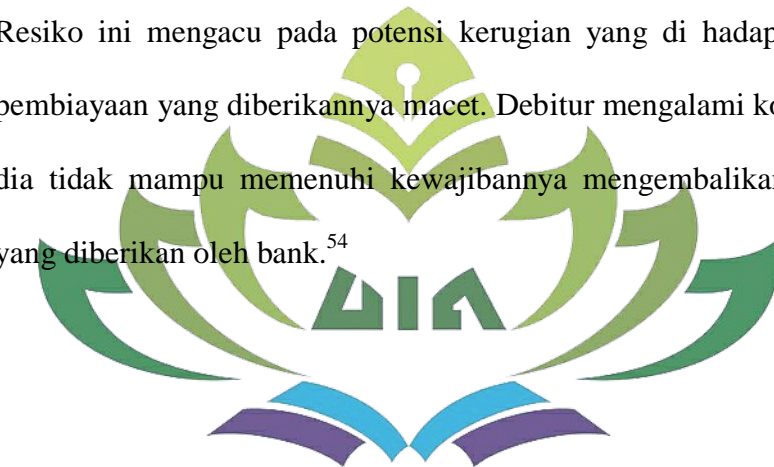
⁵⁰ PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah) No. 102 tentang *Akuntansi Murabahah*

⁵¹ Wangasawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*.(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2012), h. 205

dari kejadian resiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial dan nonfinansial.⁵²

Resiko kredit adalah akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Istilah resiko kredit ini digunakan dalam buku ini sesuai PBI Manajemen Resiko untuk perbankan syariah yang berlaku.⁵³

Resiko Pembiayaan sering kali dikaitkan dengan resiko gagal bayar. Resiko ini mengacu pada potensi kerugian yang di hadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi di mana dia tidak mampu memenuhi kewajibannya mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank.⁵⁴



⁵² Bambang Rianto Rustam, *Manajemen resiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat , 2013), h. 30

⁵³ *Ibid*, h. 55

⁵⁴ Imam Wahyuni Dkk, *Manajemen Resiko Bank Islam* (Jakarta : Salemba Empat, 2013 h. 90-91

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Sejarah BPRS Bandar Lampung

BPRS Bandar Lampung sebagai lembaga keuangan syariah bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan khususnya bagi anggota kopraasi dan juga dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. BPRS Bandar Lampung didirikan melalui proses akuisisi oleh pemerintah kota Bandar Lampung terhadap BPRS sakai sembayan yaitu bank syariah pertama di propinsi lampung yang beroperasi sejak tahun 1996 yang didirikan atas prakarsa bapakpoedjono pranyoto Gubernur Lampung saat itu, bersama para pejabat teras di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, ICMi Orwil Lampung dan MUI Propinsi Lampung dengan modal dasar saat itu sebesar Rp. 500 juta yang beralamat di kecamatan Natar-Lampung Selatan.

Sejak berdiri pada tahun 1996 perkembangan usahanya mengalami pasang surut dan pada tahun 2006 bank tersebut mulai mengalami masalah hingga penurunan kinerja yang dikarenakan banyaknya pembiayaan bermasalah (NPF) dan manajemen pengelolaan bank yang kurang profesional. Sejak itulah bank mengalami masalah yang cukup besar yaitu mulai dari kekurangan kecukupan modal (CAR) dan kesulitan likuiditas yang

berakibat bank ini menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) oleh Bank Indonesia.

Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai rencana untuk mendirikan BPR Syariah (Bank Syariah) dengan membentuk Tim Pendirian Bank Syariah yang bekerjasama dengan Konsultan dari Fakultas Ekonomi Unila dalam melakukan kajian tentang kelayakan pendirian Bank Syariah Kota Bandar Lampung. Dari hasil kajian tsb dinyatakan bahwa Pemda Kota Bandar Lampung sudah layak untuk mendirikan BPR Syariah.

Adapun kesimpulan dari hasil kajian tentang kelayakan pendirian Bank Syariah merekomendasikan sebagai berikut :

1. Bank Pasar Kota Bandar Lampung dikonversi menjadi Bank Pasar Syariah.
2. Menambah divisi Syariah pada Bank Pasar Kota Bandar Lampung, atau
3. Mendirikan bank baru yaitu Bank Pasar Syariah Bandar Lampung.

Setelah melalui beberapa tahapan proses tentang pendirian Bank Syariah maka selanjutnya rencana pendirian Bank Syariah tsb direalisasikan dengan cara akuisisi, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 91 Tahun 2008

tanggal 13 Oktober 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp.2.957.000.000,-.

Pelaksanaan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung di BPRS Sakai Sambayan dilakukan melalui RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Bambang Abiyono, SH. No. 20 tanggal 5 Desember 2008 tentang Akuisisi dan Akta Notaris Bambang Abiyono, SH Nomor 21 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan yang telah mendapat pengesahan Menkum dan Ham RI pada tanggal 04 Nopember 2009. Maka dengan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 2.957.000.000,- dari total modal setor seluruh pemegang saham BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp. 5.000.000.000,- setelah akuisisi dihasilkan nilai saham milik Pemda Kota Bandar Lampung menjadi sebesar Rp. 3.978.500.000,- atau 79,57%.

Pada Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut diatas juga disetujui antara lain :

- a. Menambah Modal Dasar Perseroan dari Rp. 5 Milyar menjadi Rp. 10 Milyar.
- b. Mengganti nama BPRS Sakai Sambayan menjadi BPRS Bandar Lampung.
- c. Melakukan Relokasi kantor dari Kecamatan Natar Lampung Selatan ke wilayah Bandar Lampung.

d. Melakukan Reorganisasi Pengurus Perseroan.

Sejak proses akuisisi tersebut dilaksanakan, maka secara operasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22 Desember 2008 oleh Bank Indonesia yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 148 Bandar Lampung, sehingga pada tanggal 22 Desember 2008 ditetapkan sebagai hari berdirinya Bank Syariah Bandar Lampung.

Keberadaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek yang cukup menjanjikan dikarenakan di Bandar Lampung satu-satunya BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah adalah BPRS Bandar Lampung. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat animo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan karena penduduk di Kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS.

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah, BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.

B. Identitas Perusahaan

NAMA PERUSAHAAN	:	PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANDAR LAMPUNG
NPWP	:	02.895.636.5-323.000
LEGALITAS	:	AHU.53361.AH.01.02.TH.2019
NO. DAN TANGGAL IZIN PRINSIP	:	S-1269/MK,17/1994 TANGGAL 29 AGUSTUS 1994
	:	KEP. 013/KM.17/1996 08 JANUARI 1996
TANGGALPEMBENTUKAN	:	22 DESEMBER 2008
MODAL DASAR	:	Rp. 10.000.000,00
ANGGARAN DASAR	:	AKTA NOTARIS NO.09 TANGGAL 01-05-2009
	:	NOTARIS BAMBANG ABIYONO, S.H.
ALAMAT	:	JL. PANGERAN ANTASARI NO. 148 BANDAR LAMPUNG

C. Visi, Misi dan Komitmen

- 1. Visi** Menjadi BPR Syariah terbaik untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan mendukung pembangunan di Propinsi Lampung
- 2. Misi** senantiasa melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk mencapai pelayanan yang lebih baik dan handal,

Mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan turut mendukung pembangunan di Propinsi Lampung melalui sektor Perbankan Syariah.

Membina kadar-kadar wirausahawan yang berorientasi syariah sehingga menjadi bankable dan mandiri. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3. Motto Berdasar Syariah Insya Allah Lebih Barakah.

D. Susunan Pengurus

Berdasarkan surat keputusan walikota Bandar Lampung Nomor 468/23/HK/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang penerapan pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung yang telah dilakukan fit and Proper Test oleh Bank Indonesia dengan surat Bank Indonesia No. 10/31/DPBS/Bdl tanggal 04 November 2008 perihal hasil Fit and Proper Test, maka pengurus perseroan BPRS Bandar Lampung periode 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama : A Rahman Mustafa, S.E.,MM,Ak
 Komisaris Anggota : Yusran Effendi, S.E.,MM.
2. Dewan Pengawas Syariah : Ismail Saleh,S.Hi
 :Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.
3. Direksi :
 Direktur Utama :Ridwansyah,S.E.,M.E.Sy
 Direktur : Marsono,S.E.

E. Perizinan

Perizinan pada BPRS Bandar Lampung:

1. Persetujuan Prinsip Departemen Keuangan RI, No. S-1269/MK.17/1994 Tanggal 29 Agustus 1994.
2. Izin Usaha Menteri Keuangan RI. No. Kep-013.MK17/1996 Tanggal 08 Januari 1996.
3. Izin Usaha Bank Indonesia, No. 28/205/UPBR/Bdl Tanggal 13 pebruari 1996
4. Persetujuan Akuisisi Bank Syariah. No. 10/16/DPbs/Bdl Tanggal 18 Pebruari 2008

F. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Bank Syariah Bandar Lampung adalah melayani masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. penanganan pembiayaan bermasalah serta melayani jaa lainnya yang dimungkinkan berdasarkan prinsip syariah.

G. Perkembangn Usaha

Pada tanggal 22 Desember 2008 BPRS Bandar Lampung mulai beroperasi yang diresmikan oleh Bank Indonesia, sejak saat itu seluruh kegiatan usaha yang ada di BPRS Bandar Lampung dilakukan.

Perkembangan volume usaha, total asset, total pembayaran, total dana pihak ketiga, dan pinjaman yang diterima dari bank lain posisi 3 (tiga)

tahun terakhir atau 31 Desember 2014 sampai dengan posisi 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :⁶³

H. Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung

Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung:70

Dewan Komisaris	:H.A. Rahman Mustafa, S.E., M.M.Ak. Yusran Effendi, S.E., M.M.
Dewan Pengawas Syariah	: Ismail Saleh, SHI Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.
Direksi	: Dirut : Ridwansyah, S.E., M.E.Sy
Direktur	: Marsono, S.E.
Pengawasan Internal	: Syaripudin Taib, S.E.
Bagian Pemasaran	
1. Funding Officer	: Zuli Akhmaliah
2. Account Officer	: Septi Mastaliza, S.E. Berlian Feni A
1. Adm. Pembiayaan	: Siti Suryati, A.Md Dede Ali Ma'rifat, S.Kom
2. Tim Remedial	: A. Ferdiansyah, S.E. Akhmad Ikbal

⁶³BPRS Bandar Lampung, 16 September 2017

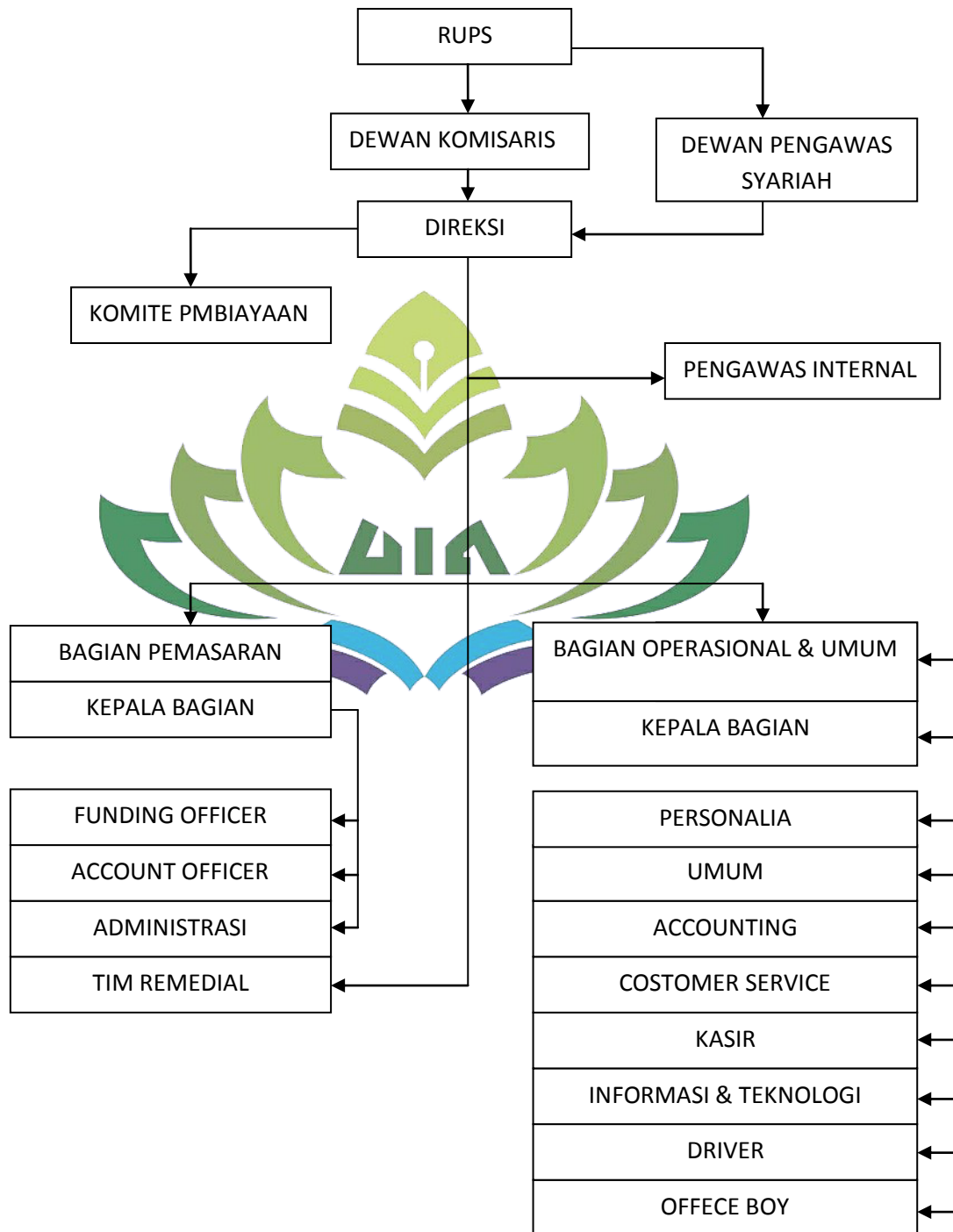
Juni Azwan, S.E

Bagian Operasional dan Umum

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Kepala Bagian | : Roslina |
| 2. Pesonalia | : Andi Irawan, S.E. |
| 3. Umum | : Wahyu Atmojo |
| 4. Accounting | : Jumhuri, S.E. |
| 5. Customer Service | : Siti |
| 6. Informasi Teknologi | : Adi |
| 7. Kasir | : Misna Warita |
| 8. Driver | : Sukarna |
| 9. Office Boy | : Aldian Kholil Prasetya |



Gambar 1.3

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH BANDAR LAMPUNG


I. Produk-Produk BPRS Bandar Lampung

Dalam kegiatan usaha Bank Syariah Bandar Lampung melayani masyarakat dalam 3 (tiga) jenis produk, yaitu:

1. Simpanan

Jenis simpanan

- a. Tabungan Syariah Titipan
- b. Tabungan Syariah Umum
- c. Tabungan Pelajar
- d. Tabungan Sikencana
- e. Tabungan Haji
- f. Tabungan Qurban
- g. Deposito Berjangka Syariah
- h. Deposito Syariah (bagi hasil)



Deposito Syariah merupakan simpanan berjangka berdasarkan prinsip bagi hasil (Al-Mudharabah) yang disediakan untuk nasabah. Dengan prinsip ini, deposito nasabah diperlakukan sebagai investasi yang digunakan oleh Bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat pengusaha maupun perorangan dalam bentuk pembiayaan Ijarah dan Al-Murabahah yang dikelola secara profesional dan memenuhi aspek Syariah. Pengelolaan dana nasabah ini dibagihasilkan sesuai nisbah yang telah disepakati.

Manfaat :

- a. Membantu program investasi nasabah.
- b. Dapat dijadikan sebagai agunan pinjaman/pembiayaan.

Keunggulan :

- a. Aman karena dijamin oleh Pemerintah/LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
- b. Bagi hasil dibayar rutin setiap bulan dan dibukukan langsung ke rekening tabungan nasabah secara otomatis.
- c. Jangka waktu dapat diperpanjang secara otomatis dan nisbah bagi hasil dapat disesuaikan dengan kesepakatan saat perpanjangan.
- d. Setoran minmal per bilyet/rekening hanya Rp.2.000.000,-
- e. Nisbah kompetitif. (*Lihat tabel nisbah dibawah*)

Persyaratan

Persyaratan	Perorangan	Perusahaan
Foto Copy KTP		
Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar		
Foto Copy NPWP dan Foto Copy Izin Usaha/ SIUP/ TDP		
Mengisi Pormulir Pembukaan Rekening		

1. Pembiayaan

a. Produk Pembiayaan berdasarkan akad:

- a) Pembiayaan jual beli (Al-Murabahah)
- b) Pembiayaan bagi hasil (Al-Mudharabah)
- c) Pembiayaan penyertaan modal (Al-Musyarakah)
- d) Pembiayaan untuk sewa manfaat (Ijarah Multijasa)
- e) Pembiayaan Kebajikan (Al-Qardh)

b. Produk pembiayaan berdasarkan penggunaan:

- a) Modal kerja (Al-Murabahah, Al-Mudharabah)
- b) Investasi (Al-Murabahah)
- c) Konsumtif (Al-Murabahah, Al-Ijarah, Al-Qardh)

c. Produk pembiayaan berdasarkan sasaran penyaluran:

- a) Pembiayaan Pengusaha Kecil dan Mikro (UKM)
- b) Pembiayaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- c) Pembiayaan Pegawai BUMN dan BUMD
- d) Pembiayaan Pegawai Perusahaan Instansi / Swasta
- e) Pembiayaan Kebajikan (Al-Qardh)

d. Jasa lainnya:

Produk jasa lainnya:

Jasa transfer dana antar bank

Fasilitas penjualan pulsa

Jasa pembayaran rekening listrik

Pembiayaan Jual Beli (Akad Al-Murabahah)

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah untuk tujuan pembelian barang – barang halal baik konsumsi mau.pun investasi, dimana Bank mengambil margin (keuntungan) dalam jumlah tertentu atas harga pokok barang tersebut. Sistem pembayaran dengan cara cicilan atau angsuran kesepakatan.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Penanganan Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo Di BPRS Bandar Lampung.

Kecelakaan atau musibah yang menyebabkan nasabah meninggal akan menyisakan utang pinjaman yang harus dibayarkan. Dalam suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Kewajiban Pihak yang berutang (debitur) untuk melunasi utang tersebut tetap ada walaupun debitur telah meninggal dunia dan utangnya belum lunas.⁶⁴ Adapun pelaksanaan penanganan pembiayaan yang apabila nasabahnya meninggal dunia tetapi masih mempunyai kewajiban/utang yang harus dilunasi adalah melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:⁶⁵

Jadi ketika debitur meninggal dan masih menyisakan utang, apa yang harus dilakukan? Jika utang tersebut sedikit tidaklah menjadi beban yang berat, tapi jika dalam jumlah yang banyak banyak pastilah akan membebani ahli waris. Oleh sebab itu, penyaluran pembiayaan pada BPRS Bandar Lampung diperlukan adanya perlindungan bagi nasabah apabila terjadi resiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan keuangan nasabah yang disebabkan nasabah

⁶⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Op.Cit*, h. 400

⁶⁵ *Ibid*, h. 402-403

meninggal dunia dalam masa perjanjian pembiayaan.⁶⁶ Karena adanya risiko seperti itu bank menyertakan asuransi pada setiap pinjaman atau kredit yang dikeluarkan mereka. Dengan adanya asuransi itu ahli waris bisa terbebas dari tunggakan utang jika debitur meninggal dunia.

Namun, jika debitur tidak menyertakan asuransi pada pinjaman atau kredit mereka maka apabila debitur kemudian meninggal sebelum dilunasinya utang tersebut, maka utang tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya untuk dilunasi.

Dalam penanganan pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo, BPRS Bandar Lampung menggunakan asuransi. Biaya untuk asuransi hanya satu kali pada saat akad pembiayaan.⁶⁷

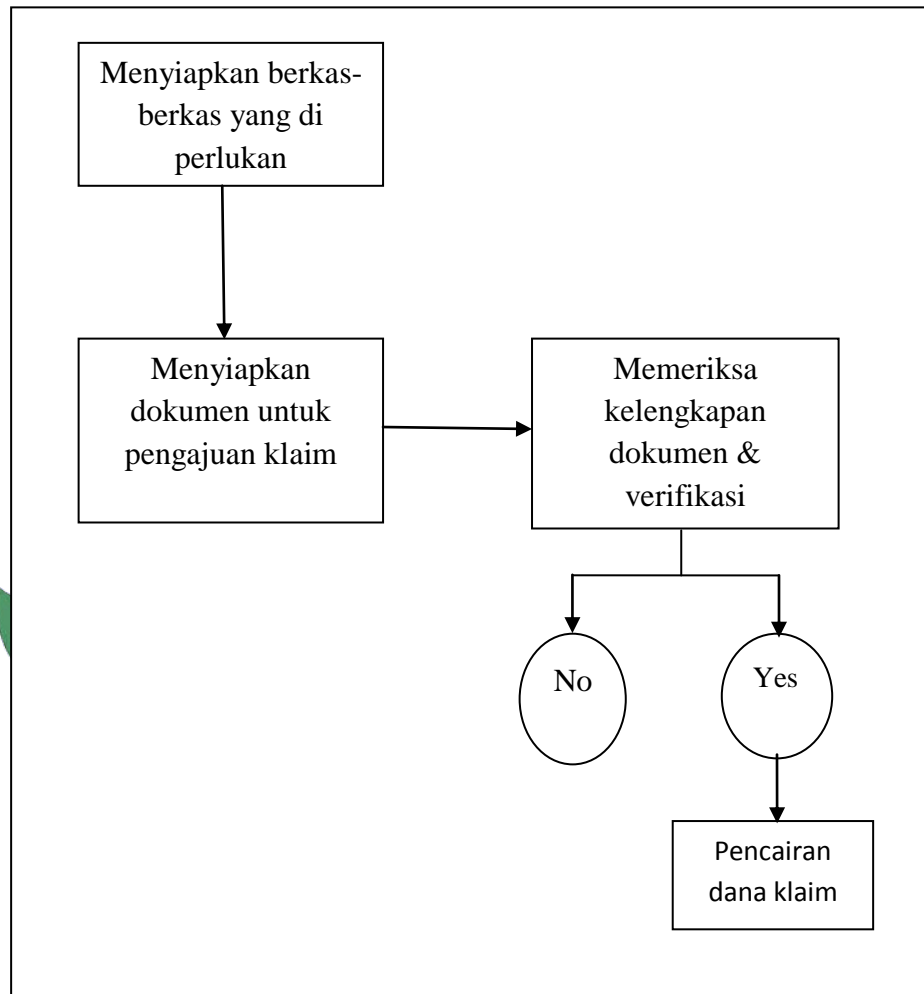
1. Persyaratan pengajuan klaim asuransi yang akan dikirim.
 - a. Surat permohonan klaim dari BPRS Bandar Lampung (menuliskan berapa jumlah tangguhan pokok/ saldo pokok pembiayaan anggota).
 - b. Fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (KTP & KK).
 - c. Fotocopy surat keterangan kematian dari kepala desa/ kelurahan.
 - d. Fotocopy akad pembiayaan.
 - e. Fotocopy riwayat angsuran/rekening pembayaran anggota.
 - f. Fotocopy rekap laporan peserta asuransi pada bulan pembiayaan.
 - g. Kuitansi bank untuk setoran asuransi pada bulan terkait.

⁶⁶ Surat keputusan Direksi BPRS Bandar Lampung

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak Dede Ali Ma'rifat, Adm Pembiayaan BPRS Bandar Lampung 25 September 2017

2. Proses Klaim Asuransi.

Gambar 1.4
Proses Klaim Asuransi



Dalam proses klaim asuransi yang pertama ahli waris ini menyiapkan berkas-berkas yang menyatakan bahwa nasabah ini benar-benar meninggal dunia, setelah itu apabila berkas telah diserahkan kepada pihak bank maka bank akan menyiapkan dokumen untuk pengajuan klaim asuransi kepada pihak asuransi, setelah diajukan kemudian pihak asuransi memeriksa

kelengkapan dokumen dan verifikasi, yang terakhir adalah penentuan apakah klaim diterima atau ditolak. Apabila terjadi gagal klaim, yang mengakibatkan kewajiban nasabah tidak dapat dilunasi oleh perusahaan asuransi maka seluruh kewajiban pembiayaan nasabah menjadi tanggungan ahli waris untuk mengangsur/ membayar sisa kewajiban sampai dengan lunas.

Pada kasus yang terjadi di BPRS Bandar Lampung, nasabah yang bernama Haryoko Syaefuddin mengajukan pembiayaan kepada BPRS Bandar Lampung dengan menyertakan agunan. Kemudian diketahui bahwa ternyata Bapak Haryoko Syaefuddin mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000 dengan Margin yang ditentukan sesuai kesepakatan. Setelah berjalannya waktu ternyata nasabah ini meninggal dunia dengan menyisakan hutang atau angsuran sebesar Rp.18.900.000.

Kemudian penanganan yang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung adalah dengan membebaskan anggota keluarganya/ ahli warisnya dari hutang, dengan cara mengajukan Klaim asuransi. Pada kasus pembiayaan ini telah terdaftar di Asuransi Al-Amin pada saat akad pembiayaan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan , ketika BPRS Bandar Lampung menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya terdapat berbagai macam resiko pembiayaan, dimana terjadi kegagalan dalam pembayaran angsuran pembiayaan baik pokok maupun *mark up/ margin/* bagi hasil yang diberikan kepada anggota. Salah satu penyebab terjadinya kegagalan

pembayaran angsuran tersebut yaitu meninggalnya anggota pembiayaan sebelum jatuh tempo.

BPRS Bandar Lampung dalam menangani kasus seperti ini, cara penanganan yang dilakukan adalah dengan membebaskan sisa angsuran anggota pembiayaan yang meninggal dunia dan menggantinya dengan cara mengajukan klaim kepada pihak asuransi.

Dalam hal ini BPRS Bandar Lampung sudah melakukan penanganan sesuai SOP, tetapi masih ada kasus bahwa terjadi gagal klaim yang mengakibatkan perusahaan asuransi tidak dapat dilunasi oleh perusahaan asuransi, sehingga menjadi tanggungan ahli waris yang menanggung sisa hutang tersebut.

B. Penanganan BPRS Bandar Lampung pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dalam pandangan Prinsip Ekonomi Islam ?

Prinsip-prinsip ekonomi islam yang merupakan bangunan ekonomi islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (keuntungan). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi islam.⁶⁸

⁶⁸Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: III T, 2002),h.17

1. Prinsip tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁶⁹

2. Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber dayadiarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adail dan baik. Dalam banyak ayat, Allah

⁶⁹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007)h.14-15

memerintah manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.⁷⁰


3. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani

⁷⁰*Ibid, h.16*

manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4. Khilafah



Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

5. Ma'ad

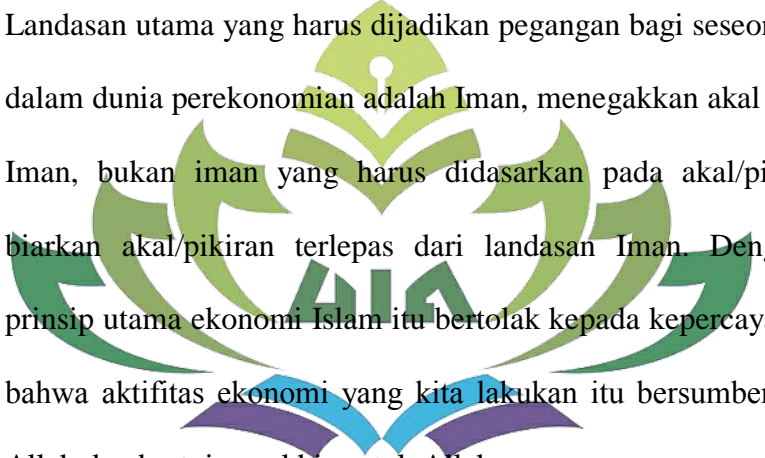
Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada

Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat”. Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, disatu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan.⁷¹ Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan.

Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwah). Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosio-politik, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan

⁷¹*Ibid*, H,23

banyak rinciannya ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan karena dilestarikannya metode-metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam modern orang bisa menemukan banyak uraian rinci mengenai hal ini. Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu :

- 
- a. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan/keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari'ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.
 - b. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.
 - c. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak

manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.

d. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik nutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.

e. Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat Muslim dengan landasan tegaknya keadilan.⁷²

Berdasarkan pandangan Ekonomi Islam, menolong sesama muslim dalam berbuat kebaikan adalah suatu tindakan yang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari karena sebagai sesama muslim kita diibaratkan sebagai 1 tubuh jadi ketika terdapat muslim yang merasa sakit (kesusahan) maka semua muslim juga merasakan hal tersebut. Sebagaimana terdapat dalam hadits Rasulullah :

artinya: *Orang-Orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, & menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yg sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) & panas (turut merasakan sakitnya) ' Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Al Hanzhali; Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Mutharrif dari Asy Sya'bi dari An Nu'man bin Bisyr dari Nabi dgn Hadits yg serupa.. [HR. Muslim No.4685]*

⁷²Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), H. 5-11

Hadits ini menjelaskan bahwa sesama muslim harus saling peduli satu sama lain apabila muslim satu dalam keadaan kesusahan maka muslim yang lain harus peduli.

QS. Al-Baqarah (2): 280 menegaskan:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Berdasarkan surat Al-baqarah (2) ayat 280 sebagaimana tersebut diatas, maka untuk pelaksanaan penanganan pembiayaan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu

1. Memberi tangguhan sampai debitur berkelapangan

Tahap pertama memberikan tangguhan sampai debitur berkelapangan. Dengan penangguhan atau penjadwalan pembayaran kewajiban tersebut diharapkan debitur mempunyai kemampuan membayar kembali utang tersebut oleh debitur boleh jadi karena usaha dari debitur dapat berjalan kembali sebagai *first way out*. Jadi dalam tahapan pertama kreditur hanya memberikan penangguhan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran utang saja sampai debitur berkelapangan, saat ini memberikan penangguhan

dalam praktik perbankan dilakukan dengan cara melakukan penjadwalan kembali.

2. Menyedekahkan sebagian utang debitur

Tahap kedua, apabila setelah diberikan penangguhan ternyata debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka kreditur dapat menyedekahkan piutangnya kepada debitur. Bagi seorang muslim menyedekahkan piutang ini lebih baik, Qur'an tidak menjelaskan besarnya jumlah utang/piutang yang boleh disedekahkan. Karena itu, besarnya piutang yang disedekahkan kepada debitur tersebut tergantung kerelaan kreditur. Dalam praktik perbankan dilakukan dengan cara melalui persyaratan kembali akad pembiayaan.

3. Menyedekahkan seluruh sisa utang debitur

Tahap ketiga, apabila setelah dilakukan upaya-upaya penangguhan dan penyedekahan sebagian utang pokok atau kewajiban lain dari debitur, ternyata pembiayaan tersebut tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka terhadap seluruh utang debitur dapat disedekahkan. Dalam praktik perbankan, menyedekahkan seluruh sisa utang debitur dilakukan dengan cara memberikan hapus tagih.

Jadi ketika terdapat anggota yang meninggal namun ia masih mempunyai kewajiban pembayaran angsuran seharusnya kita sebagai sesama muslim kita dianjurkan untuk saling tolong menolong sebagaimana yang terdapat dalam QS.Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَنَغَوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)

Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam dan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di BPRS Bandar Lampung ini sudah sesuai dengan Prinsip Keadilan. Artinya dengan dibebaskan nasabahnya dari sisa hutangnya dengan mengajukan klaim asuransi kepada pihak asuransi itu sudah tepat, karena tidak ada yg dirugikan baik dari pihak bank ataupun dari pihak nasabah.

Dengan mengasuransikan menjadi langkah yang tepat apabila terjadi nasabah yang meninggal dunia ini, akan tetapi ini juga mempunyai resiko gagal klaim apabila ahli waris tidak mengurus surat-surat kematian yang dibutuhkan

bank untuk mengajukan klaim asuransi. kasus seperti ini juga terjadi di BPRS Bandar Lampung sehingga bank mengalami kerugian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

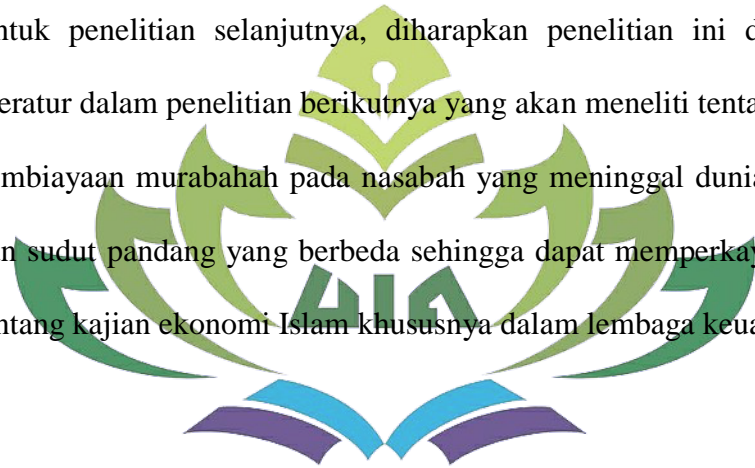
A. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan teori dan penelitian yang dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan yang dilakukan BPRS Bandar Lampung untuk kasus anggota yang meninggal dunia, namun masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran adalah dengan membebaskan angsuran pembiayaan yang kurang dengan mengajukan klaim untuk membuktikan kebenaran anggota meninggal dunia disertakan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
2. Dalam hal ini BPRS Bandar Lampung dalam menyelesaikan masalah terutama pada penanganan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo sudah sesuai dengan perspektif Islam karena dari prosesnya BPRS Bandar Lampung menerapkan prinsip keadilan yang mana tidak ada pihak yang dirugikan semuanya sudah sesuai dengan asas-asas Islam.

B. Saran

1. Untuk keluarga nasabah yang ditinggalkan harus segera melapor apabila nasabah bank ini meninggal dunia dan mengurus berkas yang diperlukan bank untuk pengajuan klaim asuransi.
2. Untuk BPRS Bandar Lampung kedepannya harus ada tim survei dalam menangani nasabah yang meninggal dunia ini, untuk meminimalisir resiko kerugian.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penanganan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- ArifinVeithzal Rivaidan Arviyan ,*Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Praktek ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- ArifinVeithzal Rivai dan Arviyan, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*.
- Achmadi Cholid Narkubo dan Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara 2007.
- Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Prees,2001).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, Danakarya, 2004).
- Haroen Nasrun,*Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Heykal Nurul Huda dan Mohammad, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta : PT Fajar Interpretama, 2013.
- Hamid Ahmad Rodani dan Abdul, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim 2008) .
- Kasmir. *Manajemen Prebankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 10, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Muttaqien Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*,Yogjakarta: Safitria Insania Press, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: UUP-AMP YKPN, 2002)..

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Rasyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah* Jakarta: Pinbuk, 2000.

Rivai Veitzal, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Rivai Veitzal, *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Syar'i System*, ed. 1 (Jakarta : Raja Grafindo. 2007).

Sutedi Adrian, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Sjhdeini Sutan remy, *Perbankan Syariah dan Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014.

sjahdeini sutan remy. *perbankan syariah* , Jakarta: Kencana, 2014.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM. 2002).

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA BANDUNG, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA. 2010.

sudjana Nana, *tuntunan penyusunan karya ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 1991.

Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet(Jakarta: Pustaka Grafiti, 1999).

Salman Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang : Akademia Permata, 2012.

Tika Moh Papundu, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)

Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wangasawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*.(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2012.

Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait : BMI dan Tafakul di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Zulkifli Suharto, *Panduan praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003).

Ainah Rahmawati, *Analisis Penyaluran Pembiayaan bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kota Baru Januari 2013-Desember 2013*, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2015).

Muhammad Nirwan Fauzy. *analisis penanganan pembiayaan mudharabah pada anggota yang meninggal dunia* di (BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang). (program diploma III perbankan syariah) fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN walisongo semarang, 2016.

Muhammad Zainudin. *analisis penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dalam perspektif ekonomi islam*(Studi Pada BMT Surya Sekawan Mandiri).(Skripsi Strata Satu Program Studi (Ekonomi Islam) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015).

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah) No. 102 tentang *Akuntansi Murabahah*.

<http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-jual-beli-murabahah>.

[Http://www.bi.go.id/UU/No.21/Tahun 2008](http://www.bi.go.id/UU/No.21/Tahun%202008). (16 September 2017).

<http://banksyariahlampung.com> Di akses pada tanggal 18 april 2017.

<http://ojk.co.id> Di akses pada tanggal 17 april 2017.

PT. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), Bandar Lampung.

Statistik perbankan syariah (*Islamic banking statistik*) (online), tersedia:
[http://www.bi.go.id/UU No.21 Tahun 2008](http://www.bi.go.id/UU/No.21/Tahun%202008).







